

# EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM LAMPU TENAGA SURYA HEMAT ENERGI DI DESA RIAM KIJANG KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN SINTANG

Oleh :

**AYUNI MUKHAROMAH<sup>1\*</sup>**

NIM. E1011171080

Joko Triyono<sup>2</sup>, Deni Darmawan<sup>2\*</sup>

Email: [ayuni.mukharomah@untan.ac.id](mailto:ayuni.mukharomah@untan.ac.id)

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses evaluasi Kebijakan Program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di Desa Riam Kijang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah program LTSHE yang ada belum mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat desa Riam Kijang. Penelitian ini menggunakan teori kriteria evaluasi menurut Dunn (dalam Nugroho 2003, 186) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan tiga dari enam kriteria, yaitu: 1) Efektivitas yaitu Hasil dari program LTSHE tidak mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat; 2) Kecukupan yaitu pengendalian, pengontrolan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah belum cukup hanya dengan LTSHE ini karena tidak memenuhi kebutuhan listrik masyarakat; 3) Responsivitas yaitu dimana respon dari masyarakat terhadap LTSHE ini masih kurang untuk memenuhi kebutuhan listrik dan kurang memahami teknis LTSHE ini. Ketiga kriteria tersebut dipilih karena permasalahan yang didapatkan penulis di lapangan lebih dekat dengan ketiga kriteria tersebut. Saran penelitian ini adalah diharapkan kepada lembaga yang berwenang lebih memahami tujuan daripada kebijakan LTSHE ini.

**Kata kunci:** Evaluasi, Kebijakan Publik, LTSHE

**THE EVALUATION OF ENERGY-SAVING SOLAR LIGHTS PROGRAM POLICY IN  
RIAM KIJANG VILLAGE SUNGAI TEBELIAN DISTRICT SINTANG REGENCY**

By:

**Ayuni Mukharomah<sup>1\*</sup>**

ID E1011171080

Joko Triyono<sup>2</sup>, Deni Darmawan<sup>2\*</sup>

Email: [ayuni.mukharomah@untan.ac.id](mailto:ayuni.mukharomah@untan.ac.id)

1. Student of Public Administration Study Program of Social and Political Science Faculty of Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Lecturer of Public Administration Study Program of Social and Political Science Faculty of Universitas Tanjungpura Pontianak.

**ABSTRACT**

*This study aimed to analyze the evaluation process of Energy-Saving Solar Lights Program Policy (LTSHE) in Riam Kijang Village. This study used a descriptive research method with a qualitative approach. The problem in this research was that the existing LTSHE program was not able to fulfil the electricity needs of Riam Kijang Village community yet. This study used Dunn's evaluation criteria theory (in Nugroho 2003, 186) which consisted of effectiveness, efficiency, sufficiency, alignment, responsiveness, and accuracy, however in this research, the researcher only used effectiveness, sufficiency, and responsiveness criteria. The results showed that the result of LTSHE program was not able to fulfill the electricity needs of the community. The results also showed that the management, controlling, and supervision which were done by the government was not enough yet with the LTSHE due to unable to fulfill the electricity needs. Lastly, the results showed that the response of community towards the LTSHE was still low to fulfil the electricity needs and the community did not quite understand the LTSHE technician. These three criteria were chosen because the problem obratined by the researcher in the field was closer to these these three criteria. The researcher suggests that the authorized institution should understand more the goals of this LTSHE policy.*

**Keywords:** Evaluation, Public Policy, LTSHE

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Energi listrik berperan sebagai faktor penting yang menunjang pembangunan masyarakat dan suatu wilayah. Energi listrik juga berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik telah menjadi kebutuhan utama dalam setiap kegiatan, baik dalam kegiatan rumah tangga ataupun kegiatan perekonomian. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kegiatan perekonomian, maka kebutuhan energi listrik masyarakat juga mengalami peningkatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan listrik antara lain, harga bahan bakar, ketersediaan energi primer, dan teknologi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan listrik antara lain, harga bahan bakar, ketersediaan energi primer, dan teknologi.

Pendistribusian energi listrik di

Indonesia belum menyeluruh hingga pelosok nusantara. Sehingga banyak daerah terpencil yang masih menggunakan pembangkit energi konvensional, seperti generator/diesel atau bahkan tidak memiliki jaringan listrik sama sekali. Potensi energi matahari di Indonesia yang notabene sebagai negara tropis dengan radiasi rata-rata sebesar 4,5kWh/m/hari (Solarex, 1996). Potensi energi matahari tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif yang tersedia sepanjang tahun dan murah. Salah satu teknologi pemanfaatan energi matahari menjadi listrik adalah Lampu Tenaga Surya Hemat Energi. Kelebihan dari pembangkit listrik tenaga surya adalah bebas dari polusi lingkungan dan bersifat terbarukan. Disamping itu, kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau menyebabkan banyaknya daerah terpencil yang belum terjangkau listrik PLN.

Energi Surya merupakan sumber energi yang tidak terbatas dan tidak akan pernah habis ketersediannya dan energi ini juga dapat di manfaatkan sebagai energy alternatif yang akan diubah menjadi energi listrik, dengan menggunakan sel surya. Panel surya sebagai sumber energi listrik alternative dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan energy listrik, namun terkendala dengan ketidak tersediannya energi listrik.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Agung Kuswandono di Pontianak, mengatakan desa atau masyarakat yang mendapatkan bantuan program LTSHE tersebut, yakni bagi masyarakat atau desa yang belum mendapatkan akses listrik.

Untuk wilayah Kalimantan Barat, terdapat tiga daerah dengan total penerima 2.438 Kepala Keluarga. Rinciannya yakni Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak tujuh desa atau sebanyak 957 KK, kemudian di Landak sebanyak dua desa atau 494 KK dan Kabupaten Sintang sebanyak enam desa atau 987 KK yang menerima bantuan program LTSHE tersebut.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik

Desa Riam Kijang merupakan suatu desa yang terletak di Kecamatan sungai Tebelian, Kabupaten Sintang. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Tentang Pemekaran Desa di Kecamatan sungai Tebelian Kabupaten Sintang No 10 Tahun 2007 Desa Lebak Ubah dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Lebak Ubah sebagai Desa Asal/Induk dan Desa Riam Kijang sebagai Desa Pemekaran sehingga Desa Riam Kijang merupakan Desa pemekaran. Dengan kata lain Desa Riam Kijang dapat dikatakan desa baru atau muda yang minim fasilitas salah satunya Listrik,

Dilihat dari perspektif historis Desa Riam Kijang selama ini belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah berupa pembangkit listrik yang optimal. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat membeli mesin sendiri atau genset namun hal ini juga tidak bisa dirasakan oleh semua masyarakat karena masih banyak masyarakat yang masih belum mampu untuk membeli mesin atau genset tersebut.

Dengan adanya bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pemerintah berharap masyarakat dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka karena kita ketahui bahwa Desa Riam Kijang kehidupan ekonomi mereka terbilang masih rendah dan energi listrik

bermanfaat untuk menunjang kegiatan produktivitas masyarakat.

Pada tahun 2017 dengan program anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD), desa Riam Kijang memperoleh bantuan penerangan Pembangkit listrik Tenaga Surya. Berdasarkan data administrasi desa tersebut bantuan yang diperoleh pemerintah desa berupa pembangkit Listrik tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 75 KWp dengan 300 watt perhari. Pembangkit Listrik Tenaga Surya sudah bisa dinikmati oleh masyarakat di Desa tersebut. Ada sekitar 188 KK sebagai daftar penerima bantuan Pembangkit Listrik tersebut. Meskipun terbilang mendapat alokasi yang sedikit tetapi masyarakat sangat bersyukur karena dengan demikian maka kondisi di desa akan sedikit berubah.

Pemerintah Pusat merancang pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat. Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) merupakan terobosan baru dari pemerintah untuk mengatasi masalah energi listrik yang tidak merata dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan yang selama ini belum terjangkau oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Namun fenomena yang terjadi listrik yang ada hanya cukup untuk menyalakan lampu dan peralatan-peralatan elektronik lain yang berdaya kecil. Sedangkan peralatan elektronik yang

berdaya besar tidak mampu dialiri listrik karena kapasitas dari alokasi yang diberikan pada satu Kepala Keluarga sama dengan satu Panel.

Tenaga surya kehilangan energi ketika tenaga surya di tempatkan di lokasi berdebu. Energi yang hilang setiap tahun dari tertutupnya kaca panel surya mencapai 5% di beberapa bagian Amerika Serikat hingga 50% di wilayah Timur Tengah. Hujan dan angin cukup untuk menyapu debu dari panel. Seperti yang terjadi di wilayah Desa Riam Kijang dengan kondisi jalan poros tanah kuning yang berdebu di Desa Riam Kijang membuat panel surya tidak berfungsi dengan baik.

## 2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah dipaparkan diatas masalah yang dapat diidentifikasi:

1. PLTSHE hanya cukup untuk menyalakan lampu dan peralatan-peralatan elektronik lain yang berdaya kecil.
2. Desa Riam Kijang memiliki jalan tanah kuning (berdebu) membuat panel yang menyerap energi matahari berdebu sehingga tidak berfungsi dengan baik
3. Pada saat musim hujan LTSHE hanya bisa digunakan sekitar 6 jam

## 3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan

sebelumnya, maka fokus daripada penelitian ini pada evaluasi Kebijakan Program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi di Desa Riam Kijang Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang.

#### **4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan masalah penelitian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan yaitu bagaimana keberhasilan Evaluasi Kebijakan Program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi di Desa Riam Kijang?

#### **5. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil kebijakan program lampu tenaga surya hemat energi di Desa Riam Kijang. Karena evaluasi hasil digunakan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan atau dihentikan.

#### **6. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dibagi menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Penjelasan hal tersebut adalah sebagai berikut:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu kebijakan publik khususnya tentang Evaluasi kebijakan Program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi dan juga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya

untuk permasalahan yang sama.

##### **b. Manfaat Praktis**

Pertimbangan bagi Kepala Desa secara umum untuk meninjau kembali penerapan Program Listrik Tenaga Surya Hemat Energi Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Listrik

#### **B. KAJIAN TEORI**

##### **1. Kebijakan Publik**

Menurut Easton (Islamy 2003, 19) kebijakan publik merupakan pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat. Selanjutnya menurut Nugroho (2008, 55) kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah sebagai strategi merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan.

Proses suatu kebijakan publik perlu juga memperhatikan secara cermat jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat sehingga pada akhirnya mencapai hasil yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan, Putra (2008, 84). Selanjutnya Dunn (2003, 22) mengatakan bahwa proses pembuatan kebijakan merupakan serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut waktu, yaitu: penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penelitian kebijakan. Kebijakan tidak bisa dilepas begitu saja, kebijakan harus

diawasi dan salah satu mekanisme pengawasannya tersebut disebut sebagai evaluasi kebijakan

## 2. Evaluasi Kebijakan

Dunn (dalam Nugroho 2014, 712) secara sederhana menurutnya evaluasi kebijakan dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Sedangkan menurut Winarno (2014, 228-229) penilaian atau evaluasi suatu kebijakan merupakan langkah terakhir dalam tahap-tahap proses kebijakan. Sebagai kegiatan yang fungsional yaitu kegiatan yang tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja namun pada semua proses kebijakan publik mulai dari perumusan masalah, program-program yang dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah, implementasi, hingga dampak kebijakan, evaluasi adalah kegiatan penilaian kebijakan yang bertujuan untuk melihat apa yang menjadi sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk melihat apakah kebijakan publik tersebut telah mencapai dampak yang diinginkan/diharapkan. Oleh karenanya, penilaian atau evaluasi dapat menangkaptentang isi kebijakan, penilaian kebijakan, dan dampak kebijakan.

Definisi lain daripada evaluasi itu menurut Anderson (dalam Sulistio 2012,

52), evaluasi kebijakan publik merupakan sebuah kegiatan estimasi atau penilaian yang menyangkut substansi, implementasi dan dampak. Oleh karena itu kegiatan evaluasi adalah kegiatan fungsional yang meliputi perumusan kebijakan publik, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan implementasi maupun dampak dari kebijakan itu sendiri. Karena kita tahu bahwa setiap kebijakan akan menghasilkan dampak yang diinginkan dan tidak diinginkan, dampak yang baik dan tidak baik. Sejatinnya evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai, dan evaluasi juga diperlukan untuk melihat kesenjangan antara "harapan" dengan "kenyataan".

## 3. Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik

Kriteria –kriteria di atas ini merupakan tolak ukur atau indikator yang dapat dijadikan pedoman menurut Dunn dalam evaluasi kebijakan publik. Berikut akan di berikan penjelasan tiap-tiap indikator tersebut menurut Dunn.

### 1. Efektivitas

Menurut Winarno (2003, 184) Efektivitas dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu

terkait dengan hubungan antara hasil yang sesungguhnya dicapai.

Berdasarkan pendapat di atas, apabila capaian tujuan-tujuan suatu organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya pencapaian tujuan yang besar dari organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan masalah yang tengah ditanggapi, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan bahwa suatu kebijakan tersebut gagal. Tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya melalui proses tertentu. Ditinjau dari pengertian efektivitas adalah sejauh mana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas yang dihasilkan dan perkembangannya. Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauh mana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsinya secara optimal.

## 2. Efisiensi

Menurut Winarno (2002, 185) Efisiensi adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan

tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi adalah hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi.

Berdasarkan pendapat di atas, apabila sasaran yang ingin dicapai tujuannya oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana. Sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampaui besar dibanding dengan hasil yang ingin dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan sudah melakukan pemborosan dan tidak layak dilaksanakan.

## 3. Kecukupan

Menurut Winarno (2002, 185) Kecukupan dalam kebijakan adalah tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai, dan kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sebelum suatu kegiatan harus dilaksanakan berdasarkan analisis kesesuaian metode yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang

akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan.

#### 4. Pemerataan

Menurut Winarno (2002, 187) Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dengan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang diakibatkannya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Beberapa cara untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat, yaitu:

1. Memaksimalkan kesejahteraan individu,
2. Melindungi kesejahteraan minimum,
3. Memaksimalkan kesejahteraan bersih,
4. Mensejahterakan kesejahteraan redistributif

#### 5. Responsivitas

Menurut Winarno (2002, 189) Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan respon dari suatu aktivitas, yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat

setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan.

Dari pendapat di atas, kriteria responsivitas penting karena analisis dapat memuaskan semua kriteria lainnya: efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan dari kelompok yang semestinya diuntungkan dan adanya kebijakan. Oleh karena itu, kriteria responsivitas sebagai cerminan nyata akan kebutuhan dan nilai dari kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

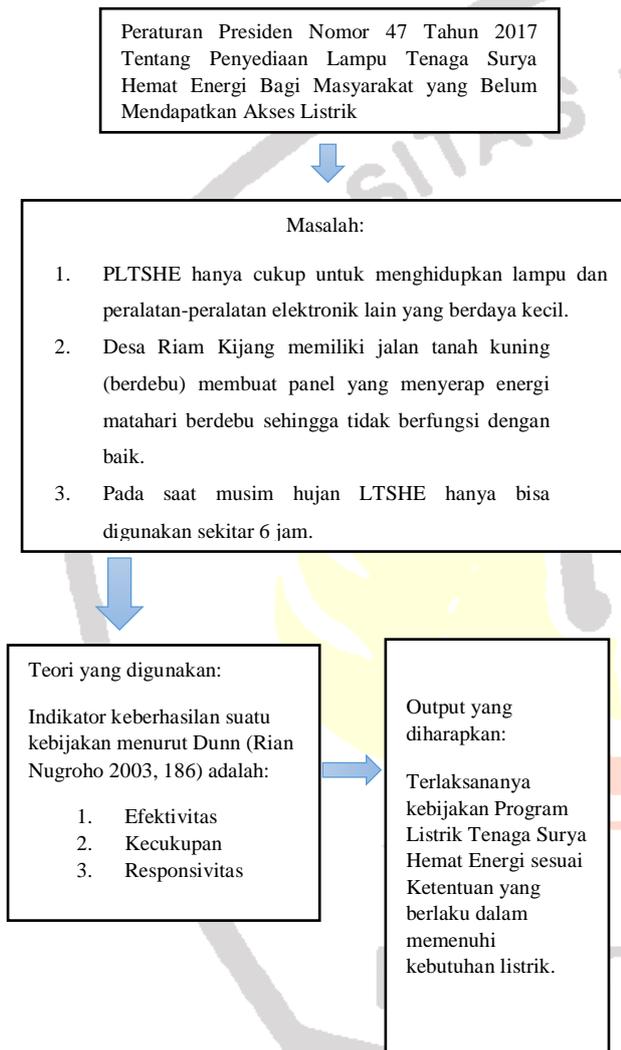
#### 6. Ketepatan

Menurut Winarno (2002, 184) Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk menjadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrument untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Menurut Dunn (dalam Nugroho 2003, 186) ada enam indikator dalam menilai Evaluasi kebijakan program Listrik Tenaga Surya Hemat Energi di

Desa Riam Kijang. Akan tetapi, berdasarkan penemuan masalah dilapangan, peneliti hanya menggunakan tigaindikator yang relevan dengan masalah yang ada yaitu efektivitas, kecukupan, dan responsivitas.

#### 4. Kerangka Pikir



#### C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitiandeskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan subyek penelitian menggunakan teknik *purposive* yaitu teknik penentuan informan dengan

pertimbangan tertentu. Objek daripada penelitian ini adalah Program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan listrik di Desa Riam Kijang Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, serta alat dokumentasi. Pada penelitian ini teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Selain itu, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

#### D. PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn (dalam Nugroho 2014, 713) yaitu kriteria evaluasi kebijakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi di Desa Riam Kijang Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, yang terdiri atas 6 indikator untuk mengukur keberhasilan suatu program yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan. Namun dalam penelitian ini peneliti

memokuskan hanya pada 3 indikator saja, yaitu Efektivitas, Kecukupan, dan Responsivitas. Secara sederhana hasil dan pembahasan dalam skripsi ini disajikan secara runtut sebagai berikut.

### 1. Efektivitas

Indikator pertama yang digunakan untuk menilai keberhasilan dari suatu program/kebijakan yaitu efektivitas. Dalam penelitian ini indikator efektivitas yakni sejauhmana keberhasilan pelaksanaan kebijakan tentang pemberian program lampu tenaga surya hemat energi kepada masyarakat desa Riam Kijang dalam menangani permasalahan kebutuhan listrik dengan tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan ini.

Dengan adanya pemberian program lampu tenaga surya hemat energi kepada masyarakat desa Riam Kijang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik mempunyai arti bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan listrik bagi warga negara yang tinggal di daerah desa Riam Kijang dalam 1 (satu) KK mendapatkan 1 (satu) buah panel surya. Hal ini dilakukan guna untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sehari-hari dan untuk mencapai tujuan daripada dikeluarkannya kebijakan ini, yaitu untuk memenuhi kebutuhan listrik

Namun program LTSHE tersebut belum memperoleh hasil yang di harapkan (efektif) karena program ini belum mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat desa Riam Kijang berdasarkan wawancara yang di lakukan peneti terhadap informan. Dimanna LTSHE ini hanya menghasilkan listrik yang berdaya kecil sedangkan kebutuahan listrik rumah tangga pada saat ini sudah sangat banyak.

### 2. Kecukupan

Indikator kedua adalah kecukupan, untuk melihat seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan permasalahan kebutuhan Listrik di Desa Riam Kijang. Kecukupan merupakan salah satu kriteria yang bias digunakan dalam mnrilai sebuah kinerja apakah sudah berjalan maksimun dan efektif sesuai dengan tujuan dari sebuah kebijakan dan program. Menurut Dunn (2003 : 610) kecukupan (*adequacy*) yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

Dapat disimpulkan kecukupan erat kaitannya dengan evektifitas, yang bias menjadi tolak ukur dan memprediksi, seberapa jauh alternative yang ada bisa memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan dalam meliputi biaya tetap dan efektivitas yang berubah dari kebijakan denga tujuanya memaksimalkan efektivitas

pada batas risorsis yang tersedia.

LTSHE ini sendiri belum cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat desa riam kijang berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di mana tujuan LTSHE ini untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di desa Riam Kijang.

### 3. Responsivitas

Indikator ketiga yang digunakan untuk mengevaluasi kebijakan program lampu tenaga surya hemat energi ini adalah responsivitas, yaitu sejauh mana tanggapan masyarakat penduduk desa Riam Kijang terkait dengan kebijakan program lampu tenaga surya hemat energi ini, respon dari suatu aktivitas, tanggapan mereka sebagai sasaran kebijakan publik atas penerapan kebijakan lampu tenaga surya hemat energi ini.

Segala Kriteria (efektivitas, Efisiensi, kecukupan, pemerataan) menurut Dunn belum sempurna jika belum ada tanggapan yang actual dari kelompok tertentu maupun masyarakat yang seharusnya diuntungkan dari adanya sebuah kebijakan. Responsivitas adalah bentuk kemampuan organisasi publik dalam menjalankan tugas dan tujuan yang berkaitan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun bentuk penilaian responsivitas yaitu bersumber pada masyarakat dan data organisasi yang di dapat dan digunakan untuk

mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan maupun program organisasi. Sedangkan data yang bersumber dari masyarakat di perlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat.

Dari hasil penelitian dapat ketahui bahwa respon daripada masyarakat terhadap kebijakan LTSHE ini tergantung dengan tujuan daripada kebijakan ini bersifat sementara atau selamanya. Dimana masyarakat menolak jika program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat desa Riam Kijang karena LTSHE ini belum mampu memenuhi kebutuhan listrik di desa tersebut.

Kemudian dari beberapa informan juga menjelaskan bahwa ada beberapa LTSHE yang sudah tidak dapat digunakan atau rusak dan tidak ada penanggungjawab khusus terhadap kebijakan ini.

## E. Penutup

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan pada data-data yang telah didapatkan, serta pada penjelasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya terkait dengan Evaluasi Kebijakan Program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi di Desa Riam Kijang Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pada data-data yang didapatkan di lapangan ada beberapa faktor yang menyebabkan hasil kebijakan

tidak seperti yang diharapkan, antara lain:

### 1. Efektivitas.

Efektivitas daripada kebijakan tentang lampu tenaga surya hemat energi dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Desa Riam Kijang sebagai berikut dapat kita ketahui bahwa program lampu tenaga surya hemat energi ini belum berhasil untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat desa Riam Kijang yang mana masyarakat masih banyak yang mengeluh dan menantikan PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik. Listrik yang dihasilkan dari program LTSHE ini hanya berupa penerangan lampu. Sedangkan kebutuhan listrik rumah tangga saat ini banyak.

### 2. Kecukupan

Kecukupan hasil daripada kebijakan program lampu tenaga surya hemat energi ini yang dilakukan di desa Riam Kijang dalam memenuhi kebutuhan listrik masih kurang, meskipun program ini sudah memberikan penerangan lampu. Namun masyarakat menginginkan listrik yang dapat memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga secara maksimal.

### 3. Respon dari sasaran

Berdasarkan hasil yang di dapatkan, bahwa respon dari masyarakat yang merupakan sasaran daripada kebijakan program lampu tenaga surya hemat energy masyarakat merasa tidak

puas jika hanya LTSHE saja yang memenuhi kebutuhan listrik di Desa Riam Kijang dan tidak ada penanggungjawab khusus terhadap kebijakan LTSHE ini.

## 2. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah didapatkan, maka penulis mencoba untuk memberikan beberapa usulan yang nantinya diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak-pihak yang terkait. Adapun usulan tersebut antara lain:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisa kelayakan ekonomi LTSHE melalui metode lainnya sehingga diharapkan dapat memperkuat kelayakan pengembangan LTSHE
2. Diharapkan kepada lembaga yang berwenang lebih memahami tujuan daripada kebijakan LTSHE ini.

## F. Referensi

### Buku:

- Abdul Wahab Solichin, 2005, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Neegara*, Jakarta: Bumi Aksara
- AG, Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV.ALFABETA.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi kedua)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Islamy, Irfan, 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: RemajaRosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2004. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputido.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sulistio, Eko Budi. 2012. *Buku Ajar Studi Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Suharno. 2013. *Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sugiyon. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV.ALFABETA
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Asdi Mahasatya
- Tangkilisan, Suparno Eko. 2018. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Y.A.P
- Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: konsep dan aplikasi Analisis ProsesKebijakan Publik*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press

#### **Jurnal:**

- Martin, Djamin. 2014. *Evaluasi Penerapan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Dampaknya Terhadap Lingkungan di Desa Soko Kembang, Surabaya*. Surabaya : Lembaga Penerbit Universitas Negeri Surabaya. Vol.11 No.2Diakses 26 Maret 2021, dari <https://ejournal.unesa.ac.id>.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik
- Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Tentang Pemekaran Desa di Kecamatan sungai Tebelian Kabupaten Sintang No 10 Tahun 2007

